

**Peran Yayasan Kakak dalam Perumuskan Kebijakan Publik
Di Pemerintahan Kota Surakarta**

Fajar Nurrochman

Universitas Sebelas Maret

Fajarnur13@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Artikel ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam ikut serta perumusan kebijakan public di pemerintahan kota Surakarta melalui lembaga swadaya masyarakat yakni yayasan kakak. Yayasan kakak adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang focus utamanya pada perlindungan konsumen. Lembaga ini berdiri sebagai perwujudan dari keprihatinan sekelompok orang yang mempunyai kepedulian dan perhatian besar terhadap permasalahan anak dan konsumen. Metode yang digunakan dalam artikel ilmiah ini yakni Menggunakan penelitian metode deskriptif dan dipadu dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kajian literature, menelusuri dokumentasi laporan observasi ataupun intansi terkait dan pemberitaan yang dilansir media massa. Hasil yang ditemukan pemerintah kota Surakarta berusaha untuk terbuka dan melibatkan masyarakat dalam hal kegiatan pemerintahan yakni perumusan kebijakan public tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil yakni terdapat empat langkah dalam perumusan kebijakan public diantaranya penetapan agenda kebijakan, merumuskan masalah kebijakan, menentukan alternative kebijakan, dan melegitimasi kebijakan.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat.

ABSTRACT

Scientific article that aims to determine the role of the community in participating in the formulation of public policies in the government of Surakarta city through non-governmental organizations namely sister foundations. Brother Foundation is a non-governmental organization whose main focus is on consumer protection. This institution stands as a manifestation of the concern of a group of people who have a concern and great attention to the problems of children and consumers. The method used in this scientific article is to use descriptive method research and combined with a qualitative research approach. The method of data collection is done through interviews, literature review, tracking documentation of observational reports or related institutions and reporting reported by the mass media. The results found by the Surakarta city government tried to be open and involve the community in terms of government activities, namely the formulation of the public policy. The conclusion that can be drawn is that there are four steps in the formulation of public policies including the establishment of a policy agenda, formulating policy issues, determining policy alternatives, and legitimizing policies.

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

Keywords: *Public Policy, Community Participation, Non-Governmental Organizations.*

PENDAHULUAN

LSM atau lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat diantaranya *fasilitator, advocator, researcher*, dan *community organizer*. Yayasan kakak adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang focus utamanya pada perlindungan konsumen. Lembaga ini berdiri sebagai perwujudan dari keprihatinan sekelompok orang yang mempunyai kepedulian dan perhatian besar terhadap permasalahan anak dan konsumen. Persoalan konsumen anak yang menonjol adalah semakin meningkatnya pola hidup konsumtif. Hal ini dikarenakan gencarnya dunia usaha yang menjadikan anak-anak sebagai sarana produk mereka. Hal itulah yang membuat anak-anak akhirnya terlibat dalam portitusi anak karena perilaku konsumtif tadi.

Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kakak bergerak dalam hal *fasilitator, advocator, researcher*, dan *community organizer*. *Fasilitator* sebagai memfasilitasi proses belajar masyarakat dan kegiatan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. *Advokator* sebagai mendorong terjadinya perubahan perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada keentingan dan hak-hak anak. *Community Organizer* sebagai memperkuat akses terhadap sumber daya, penguasaan informasi dan organisasi masyarakat. Lalu *Researcher* melakukan penelitian penelitian kritis yang mampu mendorong terbangunnya ilmu pengetahuan masyarakat. Yayasan Kakak yang sedang digencarkan pada bulan april 2019 yakni peran advocator dalam mendorong pemerintahan solo dalam sahkan perda kawasan tanpa rokok, Hal tersebut guna memenuhi capaian kota layak anak di tingkat utama (TribunSolo.com). Aksi tuntutan perda KTR ini digelar di simpang tiga Sriwerdari dan diikuti forum anak sesurakarata, dalam aksi tersebut memaparkan sesuai dengan peraturan

dalam negeri nomor 7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok dijelaskan terdapat tujuh kawasan terbebas asap rokok diantaranya: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, bermain anak, ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. Aksi tersebut juga membeberkan spanduk putih guna pejalan kaki di CFD dapat membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan KTR di kota Solo.

Berdasarkan yang diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait peran LSM dalam upaya mendorong kebijakan pemerintahan kota Surakarta. Maka diambilkan judul **Peran Yayasan Kakak dalam Perumusan Kebijakan Publik Di Pemerintahan Kota Surakarta**. Berdasarkan pendahuluan, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terkait diantaranya:

1. Bagaimana proses perumusan kebijakan public pemerintahan kota Surakarta?
2. Bagaimana penerapan peran masyarakat dalam merumuskan kebijakan public di Kota Surakarta?

Penyusunan penulisan artikel ilmiah memiliki tujuan diantaranya:

1. Penulis maupun pembaca agar mengerti bagaimana perumusan kebijakan public pemerintahan di kota Surakarta setelah membaca hasil penelitian ini.
2. Penulis maupun pembaca akan mengerti dan paham peranan LSM dalam ikut merumuskan kebijakan Publik dikota Surakarta setelah membaca hasil penelitian ini.

Kerangka Teori

1. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM merupakan lembaga masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan,
dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

hidup masyarakat yang bertitik beratkan pada pengabdian secara swadaya. Peter Hannan (1988) seorang pakar ilmu social berasal dari Australia, menyebutkan LSM merupakan organisasi yang bertujuan mengembangkan pembangunan ditingkat grassroots melalui penciptaannya dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya local. Sasaran menjadikan LSM kelompok-kelompok berswadaya setelah proyeknya berakhir.

2. Kebijakan Publik
Kebijakan menurut *Thomas Dye* pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Easton* berpendapat kekuasaan yang mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan public dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan. Sesuatau kebijakan public bersifat luas dan berada pada strata strategis, oleh karena itu berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan.
3. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dilakukan apabila pemerintah membuka diri dan menetapkan saluran partisipasi tanpa membedakan masyarakat menurut Douglas Yates. Berpartisipasi sama halnya untuk menetapkan rencana strategis yang memuat pandangan kedepan mengenai kebijakan, tujuan yang akan dicapai, arah kebijakan yang akan ditempuh, macam-macam program yang akan ditempuh. Partisipasi masyarakat merupakan melakukan control dan peran sertanya.
4. Konsep Kota Layak Anak
Momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan dunia layak anak seperti pemenuhan hak anak yakni Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada sesi khusus untuk anak. Di

Indonesia Peraturan Menteri PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak, Peraturan PPPA No. 12 Tahun 2011 tentang indicator Kabupaten / Kota Layak Anak, Peraturan Menteri PPPA No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak, Peraturan Menteri PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dan untuk melakukan perubahan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Menurut Vaneklasen dan Miller membagi partisipasi atas partisipasi simbolis, partisipasi pasif, Partisipasi konsultatif, partisipasi insentif Material, partisipasi Fungsional masyarakat, partisipasi interaktif masyarakat, dan pengorganisasian Diri Masyarakat.

Metode

Menggunakan penelitian metode deskriptif dan dipadu dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kajian literature, menelusuri dokumentasi laporan observasi ataupun intansi terkait dan pemberitaan yang dilansir media massa.

Hasil

A. Proses Perumusan Kebijakan Public Pemerintahan Kota Surakarta

Mengutip pandangan Palumbo (1987), membagi proses perumusan kebijakan public sebagai berikut: (1) menetapkan agenda kebijakan, (2) merumuskan masalah kebijakan, (3) mendesain kebijakan, (4) melegitimasi kebijakan, (5) melaksanakan kebijakan, (6) menilai dampak kebijakan, dan (7) menghentikan kebijakan. Yang merupakan proses perumusan kebijakan public yakni No. 1,2,3, dan 4 keempat langkah ini

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019

"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

menentukan proses pembuat kebijakan (*Policy maker*) sedangkan No. 5,6, dan 7 merupakan imlementasi kebijakan public tersebut.

- (1) Penetapan Agenda Kebijakan
Pada kegiatan ini mengkaji volume masalah dan penyebaran masalah. Setiap masalah memiliki karakteristik masalah tersendiri yang harus benar-benar dipahami oleh perumus kebijakan. Karakter dari masalah public menurut Duun: saling ketergantungan antara berbagai masalah, subyektivitas dari masalah kevbijakan, artificially masalah, dinamika masalah kebajikan. Maka upaya mencari pemecahan masalah harus senantiasa disesuaikan dengan karakteristik masalah tersebut.
- (2) Merumuskan masalah kebijakan
Setiap masalah sangat dekat dengan dan menempel pada konteksnya masing-masing, maka perumusan harus benar-benar memahami apa yang ada disekitar masalah tersebut. Dengan tersebut bias ditetapkan tujuan kebijakan dan kelompok sasaran yang akan mendapat manfaat dari kebijakan tersebut. Dalam kegiatan perumusan masalah dibutuhkan data dan informasi untuk merumuskan dengan tepat dan benar, apabila perumusan masalah tanpa didukung data dan informasi melainkan asumsi saja maka bisa menyebabkan analisis masalah salah. Tahapan perumusan masalah diantaranya: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah.
- (3) Mendesain alternative kebijakan
Pada tahap ini dilakukan kegiatan mencari dan menentukan alternative pemecahan masalah sebanyak mungkin, mengidentifikasi alternative yang paling relevan dan signifikan bagi pemecahan masalah, membandingkan suatu alternative dengan yang lainnya dan memilih atau menetapkan alternative pemecahan masalah yang terbaik. Patton dan Sawicki (1987:182-185)

mengidentifikasi beberapa metode yang dapat digunakan pembuat kebijakan untuk mengembangkan alternative kebijakan: metode status quo, metode survey cepat, tinjauan pustaka, perbandingan dengan pengalaman nyata, metode analogy metaphor synetics, curah pendapat. Terdapat beberapa variable dalam mendesain alternative kebijakan diantaranya: kesusaian visi dan misi, applicable (dapat diimplementasikan), mampu mempromosikan pemerataan dan keadilan pada masyarakat, dan mendasar pada criteria penilaian yang jelas dan transparan.

- (4) Melegitimasi kebijakan
Implementasi kebijakan sangat tergantung pada ada tidaknya dukungan dan legitimasi politis dari semua stakeholders kebijakan dan masyarakat luas, tanpa adanya legitimasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak sulit kiranya sebuah kebijakan akan bisa terlaksana secara berhasil. Perlu adanya rasa memiliki, semangat untuk berpartisipasi dan semangat untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang telah dibuat.

Pemerintahan kota Surakarta membuka seluas – luasnya terkait pelibatan masyarakat dalam hal kebijakan public, seperti website resmi pemkot Surakarta tersebut merupakan wujud nyata pemerintah terbuka untuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah. Jadi dengan website tersebut msyarakat jadi melek akan perkembangan, kinerja dan capaian dari pemerintahan Surakarta tersebut. Seperti diungkapkan diatas merupakan langkah secara teoritis dalam perumusan kebijakan public tersebut.

Dalam hal Partisipasi menurut Keith Davis yang membedakan partisipasi empat jenis diantaranya: partisipasi dalam pemangabilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi.

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan,
dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

**B. Penerapan Peran Masyarakat Dalam
Merumuskan Kebijakan Public Di
Kota Surakarta**

Berbicara nilai, norma, moral, etikadan pandangan hidup erat hubungannya seakan akan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan sebab antara satu dengan lainnya sangat melengkapi untuk dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam suatu Negara. Menurut Douglas Yates dalam masyarakat yang prural system pemerintah yang demokratis dan amanah itu berangkat dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda satu sama lain dan saling bersaing.
- b. Pemerintah itu harus menawarkan suatu akses dan sarana partisipasi yang sama kepada kelompok-kelompok kepentingan.
- c. Pemerintah harus mempunyai banyak pusat-pusat kekuasaan yang menyebar baik vertical maupun horizontal untuk menjamin keseimbangan.
- d. Pemerintahan dan politik harus dipahami sebagai sesuatu sarana kompetisi diantara kepentingan-kepentingan minoritas.
- e. Ada probabilitas yang tinggi bahwa suatu kelompok yang aktif dan legitimate dalam suatu populasi bisa membuat dirinya mendengar secara efektif terhadap tahapan-tahapan yang krusial dalam proses pembuatan kebijaksanaan.
- f. Kompetisi intitusi pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan non pemerintah bisa menyebabkan terjadinya suatu bargaining dan kompromi dan juga bisa menghasilkan suatu keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat.

Kota Surakarta merupakan kota yang menjadi percontohan kota layak anak salah satunya, lalu

merupakan kota yang berpengaruh di Jawa Tengah setelah Semarang dan sekitarnya, dan disebut sebagai pusat budaya Jawa disurakarta tersebut. Tidak heran bila Kota Surakarta ditemukan banyak kelompok kepentingan di bidangnya masing-masing seperti halnya Yayasan Kakak merupakan kelompok kepentingan yang bergerak terkait dengan perlindungan anak di wilayah Solo Raya. Tidak heran bila Yayasan Kakak ingin dilibatkan sebagai wakil masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan pemerintahan salah satunya ikut serta dalam perumusan kebijakan publik tersebut terutama di bidang yang terkait dengan anak. PKn sebagai pendidikan demokrasi yang memiliki misi meningkatkan partisipasi warga Negara untuk mengembangkan dan memelihara system politik demokrasi Pancasila. Mata pelajaran PKn membentuk nilai karakter pokok dan karakter utama, karakter pokok meliputi: kereligiusan, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kedemokratisan dan kepedulian. Sedangkan karakter utama mata pelajaran PKn yakni Nasionalis, Kepatuhan pada aturan social, menghargai keberagaman, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, dan kemandirian. Nilai karakter pokok maupun utama dapat dikembangkan menuju jenjang yang luas menciptakan karakter warga Negara yang paham hak dan kewajiban, bertanggung jawab dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Bentuk partisipasi warga Negara dalam pelestarian lingkungan hidup dilakukan melalui kegiatan-kegiatan masyarakat dan dunia pendidikan. Kompetensi kewarganegaraan diperlukan agar warga Negara dapat berpartisipasi dalam lingkungan hidup dengan pembekalan dimensi / domain knowledge, skill dan disposition tentang lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan di masyarakat dan pendidikan. Partisipasi politik warga Negara dalam pilkada terutama merupakan partisipasi electoral (voter turnout) terbagi dalam dua kategori yakni yang sifatnya konvensional dan non-konvensional. Partisipasi electoral konvensional terkait

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

dengan kepemilikan hak warga Negara sebagai pemilih, sedangkan partisipasi electoral yang non-konvensional terkait dengan partisipasi warga Negara selama pilkada dan terlibat dalam tahapan pilkada dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan pilkada. Dengan pengertian aktif dalam berbagai kegiatan kelompok kepentingan atau kelompok relawan yang terkait tersebut.

Pembentukan warga Negara demokratis dalam pembelajaran PKN perlu upaya sistemik. Dari kerangka teoritis maupun pengalaman praktis, baik didalam negeri maupun disekeliling Negara, menunjukkan bahwa pembelajaran pkn perlu pengembangan inovatif dan kreatif. Factor- factor penghambat partisipasi masyarakat yakni terdiri rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, pekerjaan dan penghasilan masyarakat, budaya ewu-pekwuh, Nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia harus dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan wawasan global warga negara muda. Pancasila sebagai landasan dalam pengembangan wawasan global warga negara, membawa implikasi bahwa warga negara muda di sekolah semestinya tidak hanya menghafal nilai-nilai Pancasila atau menjadikannya sebagai slogan, melainkan harus diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

proses perumusan kebijakan public diantaranya menetapkan agenda kebijakan, merumuskan masalah kebijakan, mendesain kebijakan, dan melegitimasi kebijakan. Menetapkan agenda kebijakan merupakan kegiatan mengkaji volume masalah dan penyebaran masalah dan karakter dari masalah public diantaranya saling ketergantungan antara berbagai masalah, subyektivitas dari masalah kevbijakan, artificially masalah, dinamika masalah

Dengan begitu agar maksimal peran serta masyarakat maka birokrasi pemerintah bisa mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

- Menyediakan banyak pusat-pusat kekuasaan sebagai sarana keseimbangan dan utnuk mengontrol jika terjadi konsentrasi kekuasaan.
- Memberikan fasilitas kepada kelompok-kelompok kepentingan agar terwakili dengan menyediakan titik-titik akses yang berlipat ganda
- Mempunyai kemauandan elemen yang kuat untuk melakukan desentralisasi
- Pemerintah menjadikan dirinya secara internal bisa bersaing
- Pemerintah harys terbuka dan partisipatif
- Pemerintah harus mampu menghasilkan bargaining yang luas.

Pemahaman peranan rakyat terkait eksistensi birokrasi pemerintah kurang memperoleh perhatian dan penekanan dalam kehidupan birokrasi public. Pejabat birokrasi pemerintah seharusnya takut kepada rakyat yang mempercayainya. Control masyarakat harus dijadikan perhatian bagi perbaikan kinerja birokrasi pemerintah. Control masyarakat bisa melalui lembaga atau organisasi organisasi sebagai wakil rakyat. Pernah dalam wawancara yayaan kakak menjadi peninjau terkait perumusan kebijakan di pemerintah kota Surakarta, alhasil hal tersebut merupakan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat sekitar.

kebijakan. Dalam kegiatan perumusan masalah dibutuhkan data dan informasi untuk merumuskan dengan tepat dan benar, apabila perumusan masalah tanpa didukung data dan informasi melainkan asumsi saja maka bisa menyebabkan analisis masalah salah. Tahapan perumusan masalah diantaranya: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah. Menentukan alternative pemecahan masalah dilakukan sebanyak mungkin, mengidentifikasi alternative yang paling relevan dan signifikan bagi pemecahan masalah, membandingkan suatu

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan,
dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

alternative dengan yang lainnya dan memilih atau menetapkan alternative pemecahan masalah yang terbaik. Kebijakan public tanpa adanya legitimasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak sulit kiranya sebuah kebijakan akan bisa terlaksana secara berhasil. Perlu adanya rasa memiliki, semangat untuk berpartisipasi dan semangat untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang telah dibuat.

Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda satu sama lain dan saling bersaing. Pemerintah itu harus menawarkan suatu akses dan sarana partisipasi yang sama kepada kelompok-kelompok kepentingan. Pemerintah harus mempunyai banyak pusat-pusat kekuasaan

yang menyebar baik vertical maupun horizontal untuk menjamin keseimbangan. Pemerintahan dan politik harus dipahami sebagai sesuatu sarana kompetisi diantara kepentingan-kepentingan minoritas. Ada probabilitas yang tinggi bahwa suatu kelompok yang aktif dan legitimate dalam suatu populasi bisa membuat dirinya mendengar secara efektif terhadap tahapan-tahapan yang krusial dalam proses pembuatan kebijaksanaan. Kompetisi institusi pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan non pemerintah bisa menyebabkan terjadinya suatu bargaining dan kompromi dan juga bisa menghasilkan suatu keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abidin Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustin Anggi. 2018. *Partisipasi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Dalam Mewujudkan Pemilu Kepala Daerah yang Demokratis*. Prosiding Seminar Nasional PPKn: 272-280.
- Anonyms. 2018. *Peraturan Menteri terkait dengan Kota Layak Anak*. Dikutip 07 Mei 2019 dari www.kla.id.
- Fadrusiana Erna Gesti. 2018 *Partisipasi Masyarakat Dalam Festival Budaya Sebagai Bentuk Penguatan Nilai-nilai Budaya di Kota Solo*. Prosiding Seminar Nasional PPKn: 281-293.
- Fitriani. 2019. *Tuntut Pengesahan Perda, Yayasan Kakak Solo Tunjukkan 7 Kawasan yang harus Bebas Rokok*. Dikutip 07 Mei 2019 dari TribunSolo: <http://solo.tribunnews.com/2019/04/14/tuntut-pengesahan-perda-yayasan-kakak-solo-tunjukkan-7-kawasan-yang-harus-bebas-rokok>
- Fitriani. 2019. *Yayasan Kakak Dorong Pemkot Solo Segera Sahkan Perda Kawasan Tanpa Rokok*. Dikutip 07 Mei 2019 dari TribunSolo: <http://solo.tribunnews.com/2019/04/14/yayasan-kakak-dorong-pemkot-solo-segera-sahkan-perda-kawasan-tanpa-rokok>.
- Guntoro Muhammad Yogi. 2018. *Partisipasi Warga Dalam Forum Musyawarah Desa Sebagai dari Demokrasi*. Prosiding Seminar Nasional PPKn: 294-306.
- Muchtarom. 2017. *Pendidikan Karakter Bagi Warga Negara Sebagai Upaya Mengembangkan Good Citizen*. Pkn Progresif. Volume 12 (1): 543-552.
- Murdiono, dkk. 2014. *Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda Berkarakter Pancasila*. Jurnal Pendidikan Karakter Vol 4 (2): 148-159.
- Nurmanita Mutiara. 2018. *Internalisasi Nilai Moral Dalam membangun civic Participation Melalui Pembelajaran PKn di Sekolah*. Jurnal PPKn. Volume 6 (2): 1329-1339.
- Oktavia, Vien Rima, Triyanto. 2018. *Strategi Pemerintahan Desa Segaran Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Dalam Pemenuhan hak Anak Menuju Desa Layak Anak*. PKn Progresif. Volume 13 (1): 73-90.
- Samsuri. 2006. *Pembentukan Warga Negara Demokratis dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. PKn Progesif Vol 1(1): 33-47.
- Suaib Muhammad ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Suprpti. 2013. *Partisipasi Warga Negara Dalam Pelestarian Kawasan Kars Sebagai Upaya Mewujudkan pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Educitizen Vol 1 (1): 99-109.
- Sutrisno, Cucu. 2017. *Partisipasi warga Negara Dalam Pilkada*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan vol 2 (2): 36-48.
- Suyatno. 2012. *Nilai, Norma, Moral, Etika dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. PKn Progesif Vol 7 (1): 34-44.
- Syahri. 2013. *Bentuk-bentuk Partisipasi Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Konsep Green Moral di Kabupaten Blitar*. Jurnal Penelitian Pendidikan vol 13 (2): 199-134.
- Triastusti Rini, Nuryadi Hendri, Eko Lancar. *Partisipasi Warga Melalui Kelompok Tani Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani*. Jurnal PPKn Volume 6 (2): 1340-1348.
- Winarno. 2012. *Karakter Warga Negara Yang Baik dan Cerdas*. PKn Progesif Vol 7 (1): 54-62.